



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

**LAPORAN KEUANGAN
OPD
KABUPATEN BANJARNEGARA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

dispermadesppkb.bna@gmail.com



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP memberikan dua pilihan basis akuntansi, yakni (1) Basis Akrual, atau (2) Basis Kas Menuju Akrual. Basis Kas Menuju Akrual boleh diterapkan paling lambat sampai dengan tahun anggaran 2014 sedangkan Basis Akrual wajib diterapkan mulai tahun anggaran 2015. Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara baru mulai menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Laporan Keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD pada Tahun Anggaran 2022. Laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Banjarnegara, 31 Januari 2024

KEPALA DISPERMADES PPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA


HENDRO CAHYONO, SE. MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19681130 199703 1 007



DAFTAR ISI

URAIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....

LAPORAN KEUANGAN.....

A LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....

B LAPORAN OPERASIONAL

C LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

D NERACA.....

E CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....

I PENDAHULUAN

II KEBIJAKAN AKUNTANSI

III PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

LAMPIRAN :

I LAPORAN-LAPORAN PENDUKUNG

1. Laporan Realisasi Anggaran :

- Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (SIMDA)
- Buku Panjar
- SPJ Pengeluaran (Bulan Desember 2023; Jenis Laporan Fungsional-SIMDA)
- SPJ Pendapatan (Bulan Desember; jenis laporan fungsional – SIMDA)
- Fotocopy STS pengembalian belanja (UP, TU, LS)
- Fotocopy Surat Setor Pajak (SSP) atas pajak yang disetorkan ke Kas Negara Tahun 2023
- Daftar Pendapatan yang tidak mencapai target/melebihi target beserta penjelasannya
- Daftar Kegiatan yang tidak dilaksanakan dan kegiatan yang anggarannya tidak terserap secara signifikan beserta penjelasannya.



2. Laporan Operasional

3. Laporan Perubahan Ekuitas

4. Neraca

- Neraca Manual dan Neraca SIMDA
- Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Salinan Rekening Koran Bank Per 31 Desember 2023
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan Per 31 Desember 2023
- Format manual beserta penjelasannya (Form 1 s/d 13)
- Berita Acara Serah Terima Aset Tetap (Mutasi)
- Berita Acara Penilaian Aset Tetap
- Berita Acara/Keputusan Penghapusan Aset
- Dokumen lain terkait Neraca SKPD

**II PERNYATAAN TELAH REKONSILIASI SALDO ASET TETAP
MENURUT AKUNTANSI DENGAN PENGURUS BARANG**

**III PERNYATAAN KESESUAIAN ANTARA CATATAN DAN FISIK
ASET TETAP (KUANTITAS DAN SPESIFIKASI)**

IV LAPORAN BARANG MILIK DAERAH

- Kartu Inventaris Barang A Tanah
- Kartu Inventaris Barang B Peralatan dan Mesin
- Kartu Inventaris Barang C Gedung dan Bangunan
- Kartu Inventaris Barang D Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Kartu Inventaris Barang E Aset tetap Lainnya
- Kartu Inventaris Barang F Konstruksi Dalam Pengerjaan



**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DISPERMADES PPKB KABUPATEN BANJARNEGARA**

Laporan Keuangan DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Banjarnegara, 31 Januari 2024
KEPALA DISPERMADES PPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA



HENDRO CAHYONO, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681130 199703 1 007



LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TA 2023		TA 2022
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain PAD yang sah	0,00	0,00	0,00
Belanja	24.878.171.906	23.634.572.157	21.372.323.260
Belanja Operasi	23.670.114.906	22.443.411.505	19.019.379.960
Belanja Modal	1.208.057.000	1.191.160.652	2.352.943.300
Surplus/Defisit	24.878.171.906	23.634.572.157	21.372.323.260

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Ringkasan Laporan Operasional disajikan sebagai berikut:

URAIAN		SALDO 2023
PENDAPATAN – LO		3.821.411.220,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO		0,00
	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00
	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00
	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00
PENDAPATAN TRANSFER – LO		0,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	0,00



LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	3.821.411.220,00
Pendapatan Hibah – LO	3.821.411.220,00
Dana Darurat – LO	0,00
BEBAN	23.902.355.469,00
BEBAN OPERASI	23.902.355.469,00
Beban Pegawai	4.402.940.021,00
Beban Persediaan	3.420.877.967,00
Beban Jasa	8.704.326.399,00
Beban Pemeliharaan	203.971.702,00
Beban Perjalanan Dinas	5.751.223.150,00
Beban Hibah	483.972.295,00
Beban Bantuan Sosial	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00
Beban Lain-lain	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	731.651.196,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	203.230.239,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	162.500,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00
Beban Bagi Hasil	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(20.080.944.249,00)

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- Koreksi kesalahan mengenai perhitungan aset lancar dan non lancar.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas, disajikan sebagai berikut :



EKUITAS AWAL	13.487.097.776,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(20.080.944.249,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Ekuitas	(2.957.059.516,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	23.634.572.157,00
EKUITAS AKHIR	14.083.666.168,00

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 (*restatement*) dapat disajikan sebagai berikut:

URAIAN		2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bank		0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD		0,00	0,00
Kas Dana BOS		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		1.041.066.748,00	550.979.051,00
JUMLAH ASET LANCAR		1.041.066.748,00	550.979.051,00
ASET TETAP			
Tanah		2.916.542.680,00	2.916.542.680,00
Peralatan dan Mesin		10.519.081.862,00	10.076.217.251,00
Gedung dan Bangunan		10.332.531.350,00	9.796.667.350,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		6.500.000,00	6.500.000,00
Aset Tetap Lainnya		16.610.000,00	16.610.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		96.681.000,00	96.681.000,00
Akumulasi Penyusutan		(10.589.140.946,00)	(9.856.606.995,00)
JUMLAH ASET TETAP		13.298.805.946,00	13.052.611.286,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00



	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
	Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
	Aset Lain-lain		3.876.000,00	0,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(3.876.000,00)	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA		0,00	0,00
	13.603.590.337,00	JUMLAH ASET	14.339.872.694,00	13.603.590.337,00
KEWAJIBAN				
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
	Utang Bunga		0,00	0,00
	Utang Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
	Utang Belanja		256.206.526,00	116.492.561,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		256.206.526,00	116.492.561,00
	256.206.526,00 116.492.561,00		256.206.526,00	116.492.561,00
EKUITAS				
	EKUITAS		14.083.666.168,00	13.487.097.776,00
	256.206.526,00 14.083.666.168,00		14.339.872.694,00	13.603.590.337,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah (KUD). Sementara itu, dalam penyajian Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca, diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas pendapatan dan aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari RKUD.



I. PENDAHULUAN

Dasar

A. DASAR HUKUM

Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005



- tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 6);

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI

<i>Entitas akuntansi</i>	Entitas akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara,
<i>Basis Akuntansi</i>	Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) / Bendahara Penerimaan atau dikeluarkan dari Bendahara Umum Daerah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Penyajian Pendapatan dan Beban dalam Laporan Operasional, diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan pendapatan dan timbulnya kewajiban dan beban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Bendahara Penerimaan/ Bendahara Umum Daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah



mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Aset

1. Aset

Adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran

kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal



saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) **Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara/daerah. PMD pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.



Aset tetap

c. Aset tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2023 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2023 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan
- (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pada Tahun Anggaran 2023, terhadap seluruh aset tetap Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dilakukan penyusutan dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, kecuali :

- 1. Tanah;
- 2. Barang Bercorak Seni Budaya
- 3. Hewan Ternak dan Tanaman
- 4. Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 5. Buku dan Perpustakaan

Sehubungan dengan mulai diterapkannya basis akrual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD yang akan dikonsolidasi menjadi laporan keuangan pemerintah daerah, Pada Tahun 2023 dilakukan perhitungan kembali akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023,

sesuai dengan peraturan yang diterapkan mengenai penyusutan aset tetap. Perhitungan kembali atas akumulasi aset tetap dimaksud dituangkan dalam neraca *restatement*.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi

dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

Pada Tahun 2023 juga dilakukan perhitungan akumulasi penyusutan/amortisasi aset lain-lain yang berupa aset tidak berwujud dan aset rusak, dan hasil perhitungan dituangkan dalam neraca *restatement*.

Kewajiban

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,



Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), Pendapatan diterima di Muka, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Pendapatan – LRA

4. Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada



saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Belanja - LRA

5. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja



tak terduga, serta belanja transfer.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Transfer

6. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil

Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi

Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah

Pembiayaan

7. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan- LO

8. Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau

- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan (kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian) dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)

Beban

9. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Beban diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



III. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. 1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran pendapatan DISPERMADESPPKB Kabupaten Banjarnegara pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total anggaran, Realisasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 23.634.572.157,00 atau 95,00% dari total anggaran. Realisasi pendapatan, belanja pada Tahun 2023, sebagai berikut :

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN	0,00	0,00	00,00	0,00
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	00,00	0,00
BELANJA	24.878.171.906	23.634.572.157	95,00	21.372.323.260
Belanja Operasi	23.670.114.906	22.443.411.505	94,82	19.019.379.960
Belanja Modal	1.208.057.000	1.191.160.652	98,60	2.352.943.300
SURPLUS/ DEFISIT	(24.878.171.906)	(23.634.572.157)	95,00	(21.372.323.260)

A. 2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp0,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	00,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00	00,00	0,00



Realisasi 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah Kabupaten Banjarnegara. Realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp0,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	00,00	0,00
Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	00,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	00,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	00,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00	00,00	0,00

Realisasi 1.1. Hasil Pajak Daerah

Penerimaan Realisasi penerimaan hasil pajak tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran yang direncanakan dalam DPA sebesar Rp0,00. Hasil Pajak Daerah yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel	0,00	0,00	0	0,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0	0,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0	0,00
Pajak Reklame	0,00	0,00	0	0,00
Pajak Penerangan jalan	0,00	0,00	0	0,00
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C	0,00	0,00	0	0,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	0	0,00
Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0	0,00
Pajak Sarang Burung	0,00	0,00	0	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0	0,00
Pajak BPHTB	0,00	0,00	0	0,00
JUMLAH	0,00	0,00	0	0,00



Realisasi

1.2. Hasil Retribusi Daerah

Penerimaan

Hasil

Retribusi

Daerah

Realisasi penerimaan hasil retribusi daerah tahun 2023 sebesar Rp,00 atau 0% dari anggaran yang direncanakan dalam DPA sebesar Rp0,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2023			Th 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0	0,00
Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0	0,00
Retribusi Perijinan Tertentu	0,00	0,00	0	0,00
JUMLAH	0,00	0,00	0	0,00

Realisasi

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah yang

Dipisahkan

Realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran yang direncanakan dalam DPA sebesar Rp0,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BPR/BKK	0,00	0,00	0	0,00
PDAM	0,00	0,00	0	0,00
Perusda Percetakan	0,00	0,00	0	0,00
PT. Bank Jateng	0,00	0,00	0	0,00
JUMLAH	0,00	0,00	0	0,00

Realisasi

1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Lain-Lain

Pendapatan

Asli Daerah

Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran yang direncanakan dalam DPA sebesar Rp0,00, yang dapat dirinci sebagai berikut

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0	0,00
Pendapatan Jasa Giro	0,00	0,00	0	0,00
Penerimaan Bunga Deposito	0,00	0,00	0	0,00
Tuntutan ganti Rugi	0,00	0,00	0	0,00
JUMLAH	0,00	0,00	0	0,00



Belanja

B. BELANJA

Realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp.23.634.572.157,00 atau 95,00% dari anggaran sebesar Rp.24.878.171.906,00, yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	23.670.114.906	22.443.411.505	94,82	19.019.379.960
Belanja Modal	1.208.057.000	1.191.160.652	98,60	2.352.943.300
JUMLAH	24.878.171.906	23.634.572.157	95,00	21.372.323.260

Belanja

1. Belanja Operasi

Operasi

Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp.22.443.411.505,00 atau 94,82% dari anggaran sebesar Rp. 23.670.114.906,00, yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	4.541.622.726	4.332.213.546	95,39	4.550.061.732
Belanja Barang dan Jasa	19.098.492.180	18.081.197.959	94,67	14.439.318.228
Belanja Hibah	30.000.000	30.000.000	100,00	30.000.000
JUMLAH	23.670.114.906	22.443.411.505	94,82	19.019.379.960

Belanja

1.1. Belanja Pegawai

Pegawai

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.332.213.546,00 atau 95,39% dari anggaran sebesar Rp 4.541.622.726,00, yang dapat dirinci sebagai berikut:



(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.671.440.051	2.541.590.831	93,13	2.886.878.399
Tambahan Penghasilan ASN	1.662.712.675	1.584.207.715	95,27	1.492.153.333
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	207.470.000	206.415.000	99,49	171.030.000
JUMLAH	4.541.622.726	4.332.213.546	95,38	4.550.061.732

Belanja

1.2. Belanja Barang dan Jasa

Barang dan
Jasa

Realisasi belanja barang tahun anggaran 2023 sebesar Rp 18.081.197.959,00 atau 94,67% dari anggaran sebesar Rp 19.098.492.180,00, dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Aggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis	3.585.233.000	3.420.476.900	95,40	1.871.209.600
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00		0,00
Belanja Jasa Kantor	4.829.670.100	4.463.690.743	92,42	5.194.900.290
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.304.027.080	3.258.478.464	98,62	3.248.923.658
Belanja Sewa Peralatan dan mesin	30.880.200	30.880.200	100	17.806.200
Belanja Sewa Gedung dan bangunan	25.626.800	25.626.800	100	27.368.000
Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi	100.250.000	98.150.000	97,90	96.681.000
Belanja Jasa	165.400.000	159.400.000	96,37	0,00



Konsultasi Non Kontruksi				
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	148.500.000	148.320.452	99,87	99.265.000
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	56.000.000	55.651.250	99,37	5.536.000
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.182.605.000	5.751.223.150	93,02	3.799.128.480
Belanja Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	670.300.000	669.300.000	99,85	78.500.000
JUMLAH	19.098.492.180	18.081.197.959	94,67	14.439.318.228

Belanja
Hibah

1.3. Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp 30.000.000,00, dirinci sebagai berikut:



(dalam satuan Rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>Tahun 2023</i>			<i>Tahun 2022</i>
	<i>Aggaran</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Realisasi</i>
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
JUMLAH	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00

Adapun rincian belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang- Undangan Indonesia dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan sosial Sosial yang di bentuk berdasarkan Peraturan Perundang -Undangan	<i>Tahun 2023 Realisasi</i>	<i>Jumlah</i>
Hibah Uang		
a Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		30.000.000,00
1. Hibah Kepada Karangtaruna Perisai Muda Desa Pekandangan Kec. Banjarmangu	10.000.000,00	
2. Hibah Kepada Karangtaruna Eka Sapta Desa Kalisat Kidul Kec. Kalibening	10.000.000,00	
3. Hibah Kepada TP PKK Desa Wanayasa Kec. Wanayasa	10.000.000,00	
		30.000.000,00



Belanja
Modal

2. Belanja Modal

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 1.191.160.652,00 atau 98,60% dari anggaran sebesar Rp. 1,208.057.000,00 dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Belanja Modal	Tahun 2023			Th 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	667.307.000	655.296.652	98,20	2.045.525.300
Bangunan dan Gedung	540.750.000	535.864.000	99,10	214.400.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset tetap Lainnya	00,00	0,00	0,00	93.018.000
JUMLAH	1.208.057.000	1.191.160.652	98,60	2.352.943.300

Surplus/(Defisit)

3. Surplus/(Defisit)

Surplus (Defisit) adalah merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah APBD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara TA 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara sebesar (Rp. 23.634.572.157) atau mencapai 95,00% persen dari yang dianggarkan surplus/(defisit) sebesar (Rp. 24.878.171.906,00)

Catatan
Penting
Lainnya

E. CATATAN PENTING LAINNYA

Informasi tambahan yang menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp 3.821.411.220,00 dan Beban yang disajikan sebesar Rp 23.902.355.469,00, sehingga terdapat surplus/defisit sebesar (Rp 20.080.944.249,00) Realisasi pendapatan, dan beban secara rinci Tahun 2023, sebagai berikut:

(dalam satuan rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2023</i>
PENDAPATAN – LO	3.821.411.220,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	3.821.411.220,00
BEBAN	23.902.355.469,00
Beban Operasi	23.902.355.469,00
Beban Transfer	0,00
Defisit Non Operasional	0,00
Beban Luar Biasa	0,00
SURPLUS/DEFISIT – LO	(20.080.944.249,00)

B. 2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

B.2.1 PENDAPATAN – LO

B.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan asli daerah LO merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah Kabupaten Banjarnegara. Realisasi pendapatan asli daerah LO Tahun 2023, merupakan pendapatan asli daerah yang sudah menjadi hak pemerintah daerah walaupun belum seluruhnya diterima di RKUD/Bendahara Penerimaan .

Pendapatan Asli Daerah – LO terealisasi Rp 3.821.411.220,00, dengan perincian, sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2023</i>
Pendapatan Pajak Daerah- LO	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah- LO	3.821.411.220,00
JUMLAH	3.821.411.220,00



B.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah- LO

Realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah- LO tahun 2023 sebesar Rp0,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2023
1	Pajak Hotel	0,00
2	Pajak Restoran	0,00
3	Pajak Hiburan	0,00
4	Pajak Reklame	0,00
	JUMLAH	0,00

B.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah- LO

Realisasi penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah- LO tahun 2023 sebesar Rp0,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Saldo 2023
Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	0,00
Pelayanan Parkiran di Tepi Jalan Umum – LO	0,00
Pelayanan Pasar – LO	0,00
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	0,00
Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	0,00
JUMLAH	0,00

B.2.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan- LO tahun 2023 sebesar Rp0,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Saldo 2023
BPR/BKK	0,00
PDAM	0,00
Perusda Percetakan	0,00
PT. Bank Jateng	0,00
JUMLAH	0,00



B.2.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LO tahun 2023 sebesar Rp 0,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2023</i>
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00
Hasil Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	0,00
Jasa Giro –LO	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir –LO	0,00
Pendapatan Hibah – LO	0,00
JUMLAH	0,00

B.2.2. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO sebesar Rp. 3.821.411.220,00 yang merupakan pendapatan atas hibah dari Pemerintah Pusat.

B.2.3. BEBAN

Realisasi Beban tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 23.902.355.469,00, yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2022</i>
1	Beban Operasi	23.902.355.469,00
2	Beban Transfer	0,00
3	Beban Non Operasional	0,00
4	Belanja Luar Biasa	0,00
	JUMLAH	23.902.355.469,00

B 2.3.1. Beban Operasi

Realisasi Beban Operasi Tahun 2023 sebesar Rp 23.902.355.469,00, yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2023</i>
Beban Pegawai	4.402.940.021,00
Beban Barang dan Jasa	18.080.399.218,00
Beban Bunga	0,00
Beban Subsidi	0,00



Beban Hibah	483.972.295,00
Beban Bantuan Sosial	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00
Beban Lain-lain	0,00
Beban Penyutan dan Amortisasi	935.043.935,00
JUMLAH	23.902.355.469,00

B.2.3.1.1. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp 4.402.940.021, yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

<i>ZUraian</i>	<i>Saldo 2023</i>
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.593.825.130
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.602.699.891
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	206.415.000,00
JUMLAH	4.402.940.021,00

B.2.3.1.2 .Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban Barang dan Jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp 18.080.399.218,00, dengan perincian, sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

<i>Nama</i>	<i>Saldo 2023</i>
Beban Barang Pakai Habis	3.420.877.967,00
Beban Barang Tak Habis pakai	0,00
Beban Jasa Kantor	4.462.490.935,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.258.478.464,00
Beban Sewa Tanah	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	30.880.200,00
Beban Sewa Gedung dan bangunan	25.626.800,00
Beban Jasa Konsultasi Kontruksi	98.150.000,00
Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi	159.400.000,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pegawai Non ASN	0,00
Beban Jasa Insentif Bagi Pagawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	148.320.452,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55.651.250,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.751.223.150,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	669.300.000,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00
JUMLAH	18.080.399.218,00



B.2.3.1.3 Beban Bunga

Realisasi Beban Bunga Tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,00, dengan perincian, sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2023</i>
Beban Bunga Utang Pinjaman	0,00
Beban Bunga Utang Obligasi	0,00
JUMLAH	0,00

B.2.3.1.4. Beban Subsidi

Realisasi Beban Subsidi Tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,00, dengan perincian, sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2023</i>
Beban Subsidi	0,00
JUMLAH	0,00

B.2.3.1.5. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah Tahun anggaran 2023 sebesar Rp 483.972.295,00, dengan perincian, sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2023</i>
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.551.652,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.418.400,00
Beban Hibah barang kepada badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan social yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan	164.494.804,00
Beban Hibah uang kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat Sosial kemasyarakatan	30.000.000,00
Beban Hibah barang kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat Sosial kemasyarakatan	284.507.439,00
JUMLAH	483.972.295,00

B.2.3.1.6. Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,00, dengan perincian, sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2023</i>
Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00
Bantuan keuangan lainnya	0,00
JUMLAH	0,00



B.2.3.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun anggaran 2023 sebesar Rp 935.043.935,00 dengan perincian, sebagai berikut:

B.2.3.1.7.1. Beban Penyusutan Mesin dan Peralatan

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2023</i>
Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	0,00
Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	22.013.237,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	267.798.617,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00
Beban Penyusutan Alat Ukur	,00
Beban Penyusutan Alat Pengolahan	0,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	158.353.960,00
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
Beban Penyusutan Alat Studio	73.578.007,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	0,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	6.421.400,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	0,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	0,00
Beban Penyusutan Unit Laboratorium Nuklir	0,00
Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	0,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan	0,00
Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	0,00
Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0,00
Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00
Beban Penyusutan Komputer Unit	170.325.100,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	33.160.875,00
Beban Penyusutan Alat Deteksi	0,00
Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika	0,00
Beban Penyusutan Sumur	0,00
Beban Penyusutan Alat Pelindung	0,00
Beban Penyusutan Alat SAR	0,00
Beban Penyusutan Rambu-rambu Lalau Lintas Darat	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	0,00
JUMLAH	935.043.935,00



B.2.3.1.7.2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	Saldo 2023
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	203.230.239,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00
Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Tugu/Tanda Batas	0,00
JUMLAH	203.230.239,00

B.2.3.1.7.3. Beban Penyusutan Jalan , Irigasi dan Jaringan

Uraian	Saldo 2022
Beban Penyusutan Jalan	0,00
Beban Penyusutan Jembatan	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Pengaman	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sumber Air dan Air Tanah	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	106.250,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Gas	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	0,00
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	0,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	56.250,00
Beban Penyusutan Jaringan Telepon	0,00
JUMLAH	162.500,00

B.2.3.1.7.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Uraian	Saldo 2023
Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	0,00
JUMLAH	0,00

B.2.3.1.7. 5. Beban Penyusutan Aset Lain-lain

Uraian	Saldo 2023
Beban Penyusutan Aset Lain-lain (Rusak)	0,00
JUMLAH	0,00

B.2.3.1.7. 5. Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud

Uraian	Saldo 2023
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00
JUMLAH	0,00

B.2.3.1.8. Beban Penyisihan Piutang

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,00, dengan perincian, sebagai berikut:



B.2.3.1.8.1 Beban Penyisihan Piutang

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2023</i>
Beban Penyisihan Piutang Restoran	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	0,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00
JUMLAH	0,00

B.2.3.1.9 Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain Tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,00, dengan perincian, sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2023</i>
Beban Lain-lain	0,00
JUMLAH	0,00

C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

EKUITAS AWAL	13.487.097.776,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(20.080.944.249,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Ekuitas	(2.957.059.516,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	23.634.572.157,00
EKUITAS AKHIR	14.083.666.168,00

Sesuai dengan Neraca Per 31 Desember 2023, Ekuitas Awal OPD Tahun 2023 sebesar Rp 13.487.097.776,00 Surplus/defisit LO adalah (Rp. 20.080.944.249,00) sedangkan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar (Rp 2.957.059.516,00), serta Kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp 23.634.572.157,00 sehingga Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2023 adalah Rp 14.083.666.168,00



D. NERACA

1. PENJELASAN UMUM NERACA

Neraca Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara per 31 Desember 2023 dengan komposisi sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Th 2023	Th 2022
		Jumlah	Jumlah
1	Aset	14.339.872.694,00	13.603.590.337,00
2	Akumulasi Penyusutan	(10.589.140.946,00)	(9.856.606.995,00)
2	Kewajiban	256.206.526,00	116.492.561,00
4	Ekuitas	14.083.666.168,00	13.487.097.776,00

2. PENJELASAN PER POS NERACA

2.1. Aset Lancar

2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.0,00

Kas di
Bendahara
Pengeluaran

Nilai ini merupakan saldo kas Per 31 Desember 2023 yang masih berada di tangan Bendahara Pengeluaran Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara terdiri atas sisa belanja Tahun Anggaran 2023 yang baru disetorkan pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan hutang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga) yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp0,00

Sisa belanja merupakan sisa dana atas pencairan SP2D, TU maupun GU yang tidak dibelanjakan oleh Bendahara Pengeluaran/PPTK Tahun Anggaran 2023 dan baru disetorkan pada Tahun 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Honor Tahun 2023 yang belum dibayarkan kepada	0,00
Gaji Bulan Desember 2023 yang belum dibayarkan kepada	0,00
JUMLAH	0,00



Kas di **2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp.0,00**

*Bendahara
Penerima*

Rekening ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang merupakan pendapatan daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 masih di tangan Bendahara Penerimaan dan baru disetor/ditransfer ke Kas Daerah pada Bulan Januari 2023

Piutang Pajak **2.1.3 Piutang Pajak sebesar Rp0,00**

Piutang pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 , yang terdiri dari :

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31/12/2023	31/12/2022
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00
Pajak Reklame	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

*Piutang
Retribusi*

2.1.4 Piutang Retribusi sebesar Rp.0,00

Piutang retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31/12/2023	31/12/2022
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan –RSUD	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan – Puskesmas	0,00	0,00
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00
Retribusi Ijin Gangguan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00



Piutang Lain-
Lain

2.1.5 Piutang Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Rp0,00

Piutang Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan yang merupakan bagian laba/deviden Tahun 2023 yang belum diterima pemda pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31/12/2023	31/12/2022
PD BPR/BKK Mandiraja	0,00	0,00
PD BKK Banjarnegara	0,00	0,00
Perusda Percetakan	0,00	0,00
Perusda Air Minum	0,00	0,00
Perusda Pertambangan	0,00	0,00
PT Bank Jateng	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

2.1.6 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan piutang atas pendapatan Lain-lain PAD yang sah yang belum diterima pemda pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31/12/2023	31/12/2022
Fasos dan Fasum	0,00	0,00
Pendapatan BLUD	0,00	0,00
Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

2.1.7. Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain merupakan Piutang selain di jenis piutang atas, yang belum diterima pemda pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31/12/2023	31/12/2022
Jumlah	0,00	0,00



Beban Asuransi **2.1.8 Beban Asuransi Dibayar Di Muka Rp.0,00**
Dibayar Di Muka

Asuransi Dibayar Di Muka Per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 merupakan nilai premi asuransi yang masih menjadi *prepaid* per 31 Desember 2023, premi dibayarkan Tahun 2023, tetapi pertanggungannya sampai dengan Tahun 2023.

Persediaan **2.1.9 Persediaan sebesar Rp 1.041.066.748,00**

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.041.066.748,00 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

Uraian Persediaan	31/12/2023	31/12/2022
Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00
Bahan Laninya	32.406.500,00	0,00
Alat Tulis Kantor	210.000,00	600.000,00
Kertas dan Cover	0,00	165.000,00
Bahan Cetak	564.500	0,00
Benda Pos	0,00	0,00
Bahan Komputer	0,00	0,00
Perabot Kantor	84.700,00	467.200,00
Alat Listrik	0,00	0,00
Perlengkapan Dinas	0,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	0,00	0,00
Obat	0,00	0,00
Obat-obatan Lainnya	1.007.801.048,00	549.746.851,00
Jumlah	1.041.066.748,00	550.979.051,00

Rincian lebih lanjut lihat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan pada lampiran.



Aset tetap

2.2. Aset tetap sebesar Rp. 23.887.946.892,00

Saldo aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 23.887.946.892. Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang dan jasa (BOP), Mutasi Masuk dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hibah Masuk dari Non SKPD, Reclass Masuk, dan Koreksi Tambah. Sedangkan pengurangan Aset tetap bersumber dari Mutasi Keluar ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hibah keluar ke non SKPD, Reclass Keluar, Koreksi Kurang, Penghapusan, dan Nilai aset di bawah minimal kapitalisasi.

Aset tetap di Neraca disajikan secara historis yaitu sebesar harga perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Berikut adalah saldo aset tetap yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:



(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Saldo 31/12/2022	Mutasi		Saldo 31/12/2023
		Tambah	Kurang	
Tanah	2.916.542.680	0,00	0,00	2.916.542.680
Peralatan dan Mesin	10.076.217.251	943.748.212	500.883.601	10.519.081.862
Gedung dan Bangunan	9.796.667.350	535.864.000	0,00	10.332.531.350
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.500.000	0,00	0,00	6.500.000
Aset tetap Lainnya	16.610.000	0,00	0,00	16.610.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	96.681.000,00	0,00	0,00	96.681.000
Jumlah	22.909.218.281	1.479.612.212	500.883.601	23.887.946.892

Perubahan aset tetap selama tahun 2023 sebesar Rp 978.728.611 yaitu saldo aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar, Rp 23.887.946.892 dikurangi saldo aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp 22.909.218.281 atau mutasi penambahan aset tetap tahun 2023 sebesar Rp 1.479.612.212 dikurangi dengan mutasi pengurangan aset tetap tahun 2023 sebesar Rp 500.883.601

Rincian Aset tetap berdasarkan Kartu Inventaris Barang dilaporkan dalam **Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Banjarnegara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan ini.

Tanah

2.2.1 Tanah sebesar Rp.2.916.542.680,00

Saldo tanah per 31 Desember 2023 sebanyak 7 bidang, luas 3.072 m² dengan nilai sebesar Rp 2.916.542.680,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebanyak 7 bidang, luas 3.072 m² dengan nilai sebesar Rp 2.916.542.680, sehingga terdapat kenaikan/penurunan dengan nilai sebesar



Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi penambahan tahun 2023 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Belanja Modal	0	0,00
• Belanja Non Belanja Modal	0	0,00
• Mutasi masuk dari SKPD	0	0,00
• Hibah masuk dari non SKPD	0	0,00
• Koreksi tambah	0	0,00
Jumlah	0	0,00

Mutasi pengurangan tahun 2023 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Mutasi keluar ke SKPD	0	0,00
• Hibah keluar ke non SKPD	0	0,00
• Reclass keluar	0	0,00
• Koreksi kurang	0	0,00
• Penghapusan	0	0,00
Jumlah	0	0,00

Tanah per 31 Desember 2023 sebanyak 7 bidang, luas 3.072 m² dengan nilai sebesar Rp 2.916.542.680,00 tersebut telah bersertifikat sebanyak 7 bidang, luas 3.072 m², dengan nilai Rp 2.916.542.680,00, sedangkan sisanya sebanyak 0 bidang, luas 0 m² dengan nilai Rp0,00 belum bersertifikat.

Peralatan dan Mesin

2.2.2 Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 10.519.081.862,00

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebanyak 1.865 unit dengan nilai sebesar Rp 10.519.081.862,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebanyak 1625 unit dengan nilai sebesar Rp 10.076.217.251,00, sehingga terdapat kenaikan sebanyak 240 unit dengan nilai kenaikan sebesar Rp. 442.864.611,00.

Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp 10.519.081.862,00 tersebut merupakan nilai historis/perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Saldo peralatan dan mesin yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebanyak 1.865 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp 10.519.081.862,00 dapat diuraikan sebagai berikut :



Alat	Saldo 31/12/2022	Mutasi Tahun 2022		Saldo 31/12/2023
		Tambah	Kurang	
Alat Besar	244.990.000	29.492.652	2.400.000	272.082.652
Alt. Angkutan	4.972.816.729	0,00	208.556.041	4.764.260.668
Alat Bengkel & Alt. Ukur	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,
Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Kantor & Rmh Tangga	1.951.035.586	378.555.560	20.201.560	2.307.389.586
Alt. Studio & Komunikasi	910.899.400	8.000.000	0,00	918.899.400
Alat Kedokteran & kesehatan	230.119.920	0,00	0,00	230.119.920
Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
Komputer	1.722.493.616	527.700.000	267.726.000	1.982.467.616
Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	32.107.000	0,00	0,00	32.107.000
Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambu-rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Pelindung Lainnya	4.955.000	0,00	0,00	4.955.000
JUMLAH	10.076.217.251	943.748.212	498.883.601	10.519.081.862

Mutasi penambahan tahun 2023 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Belanja Modal		655.296.652
• Belanja Non Belanja Modal		0,00
• Mutasi masuk dari SKPD		0,00
• Hibah masuk dari non SKPD		0,00
• Reklas masuk		285.958.500
• Koreksi tambah		0,00



Jumlah		941.255.152
--------	--	-------------

Mutasi pengurangan tahun 2023 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Mutasi keluar ke SKPD	13	208.556.041
• Hibah Keluar	0	0,00
• Reclass keluar	23	289.834.500
• Koreksi kurang	0	0,00
• Penghapusan	0	0,00
• Nilai di bawah min kapitalisasi	0	0,00
Jumlah	36	498.390.541

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebanyak 1.865 unit dengan nilai sebesar Rp 10.519.081.862 tersebut meliputi :

URAIAN	UNIT	NILAI
Alat Besar	14	272.082.652
Alt. Angkutan	106	4.764.260.668
Alat Bengkel & Alt. Ukur	1	6.800.000,00
Alat Pertanian	0	0,00
Alat Kantor & Rmh Tangga	1.336	2.307.389.586
Alt. Studio & Komunikasi	135	918.899.400
Alat Kedokteran & Kesehatan	42	230.119.920
Alat Laboratorium	0	0,00
Komputer	229	1.982.467.616
Alat Eksplorasi	0	0,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0	0,00
Alat Keselamatan Kerja	1	32.107.000
Peralatan Proses/Produksi	0	0,00
Rambu-rambu	0	0,00
Peralatan Olahraga	0	0,00
Alat Pelindung lainnya	1	4.955.000
JUMLAH	1.865	10.519.081.862



Sedangkan nilai buku Mesin dan Peralatan Per 31 Desember 2023 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Per 31 Des 2023	10.519.081.862
2. Penyusutan Tahun 2023	(731.651.195)
3. Akumulasi Peny. s/d tahun lalu	(7.716.412.069,00)
4. Akumulasi Peny. s/d tahun ini	(8.448.063.264)
5. Nilai Buku Per 31 Desember 2023	2.071.018.598

Gedung dan
Bangunan

2.2.3 Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 10.332.531.350,00

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebanyak 49 unit dengan nilai sebesar Rp. 10.332.531.350,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebanyak 43 unit dengan nilai sebesar Rp. 9.796.667.350,00. sehingga terdapat kenaikan/penurunan sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp 535.864.000,00 Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 10.332.531.350,00 tersebut merupakan nilai historis/perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Saldo gedung dan bangunan yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebanyak 49 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp .10.332.531.350,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

Alat	Saldo 31/12/2022	Mutasi Tahun 2023		Saldo 31/12/2023
		Tambah	Kurang	
Bangunan Gedung	9,796,667,350	535.864.000	0,00	10.332.531.350
Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	9,796,667,350	535.864.000	0,00	10.332.531.350



Mutasi Penambahan tahun 2023 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Belanja Modal	6	535.864.000
• Belanja Non Belanja Modal	0	0,00
• Mutasi masuk dari SKPD	0	0,00
• Hibah masuk dari non SKPD	0	0,00
• Reclass Masuk	0	0,00
Jumlah	6	535.864.000

Mutasi pengurangan tahun 2023 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Mutasi keluar ke SKPD	0	0,00
• Reclass Keluar	0	0,00
• Koreksi Kurang	0	0,00
• Penghapusan	0	0,00
Jumlah	0	0,00

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebanyak 49 unit dengan nilai sebesar Rp. 10.332.531.350 tersebut meliputi

:

URAIAN	UNIT	NILAI
Bangunan Gedung	49	10.332.531.350
Monumen	0	0,00
Bangunan Menara	0	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00
JUMLAH	49	10.332.531.350

Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Per 31 Des 2023	10.332.531.350
2. Penyusutan Tahun 2023	(203.230.239)
3. Akumulasi Penyusutan s/d tahun lalu	(1.934.847.443,00)
4. Akumulasi Penyusutan s/d tahun ini	(2.138.077.682)
5. Nilai Buku Per 31 Desember 2023	8.194.453.668



Jalan, Irigasi
dan Jaringan

2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 6.500.000,00

Saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 sebanyak 3 unit dengan nilai sebesar Rp 6.500.000,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebanyak 3 dengan nilai sebesar Rp 6.500.000,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan sebanyak 0 dengan nilai sebesar Rp 0,00. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 6.500.000,00 tersebut merupakan nilai historis/perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2022	Mutasi Tahun 2023		Saldo 31/12/2023
		Tambah	Kurang	
Jalan dan jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan air/irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi	4.250.000	0,00	0,00	4.250.000
Jaringan	2.250.000	0,00	0,00	2.250.000
JUMLAH	6.500.000	0,00	0,00	6.500.000

Mutasi penambahan tahun 2023 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Belanja Modal	0	0,00
• Belanja Non Belanja Modal	0	0,00
• Mutasi Masuk	0	0,00
• Reclass masuk dari SKPD	0	0,00
• Hibah masuk dari non SKPD	0	0,00
• Koreksi tambah	0	0,00
Jumlah	0	0,00

Mutasi pengurangan tahun 2023 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Mutasi keluar ke SKPD	0	0,00
• Hibah keluar ke non SKPD	0	0,00
• Reclass keluar	0	0,00
• Koreksi kurang	0	0,00
• Penghapusan	0	0,00
Jumlah	0	0,00



Jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 sebanyak 3 unit dengan nilai Rp. 6.500.000,00 tersebut meliputi :

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Jalan dan jembatan	0	0,00
2.	Bangunan air/irigasi	0	0,00
3.	Instalasi	2	4.250.000
4.	Jaringan	1	2.250.000
	Jumlah	3	6.500.000

Sedangkan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Per 31 Des 2023	6.500.000,00
2. Penyusutan Tahun 2023	(162.500,00)
3. Akumulasi Penyusutan s/d tahun lalu	(2.837.500,00)
4. Akumulasi Penyusutan s/d tahun ini	(3.000.000,00)
5. Nilai Buku Per 31 Desember 2023	3.500.000,00

Aset tetap 2.2.5 Aset tetap Lainnya sebesar Rp. 16.610.000,00

Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebanyak 41 unit dengan nilai sebesar Rp 16.610.000,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebanyak 41 unit dengan nilai sebesar Rp 16.610.000,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan. Sebesar Rp,00.

Saldo aset tetap lainnya yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023 adalah 41 unit dengan nilai sebesar Rp 16.610.000,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2022	Mutasi Tahun 2023		Saldo 31/12/2023
		Tambah	Kurang	
Buku perpustakaan	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
Barang bercorak kesenian	14.650.000	0,00	0,00	14.650.000
Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00



Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	16.610.000	0,00	0,00	16.610.000

Mutasi penambahan tahun 2023 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Belanja Modal	0	0,00
• Belanja Non Belanja Modal	0	0,00
• Mutasi Masuk	0	0,00
• Hibah masuk	0	0,00
• Reclas Masuk	0	0,00
• Koreksi tambah	0	0,00
Jumlah	0	0,00

Mutasi pengurangan tahun 2023 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Mutasi keluar ke SKPD	0	0,00
• Hibah keluar ke non SKPD	0	0,00
• Koreksi kurang	0	0,00
• Penghapusan	0	0,00
Jumlah	0	0,00

Aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebanyak 41 unit dengan nilai Rp 16.610.000,00 tersebut meliputi :

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Buku perpustakaan	40	1.960.000
2.	Barang bercorak kesenian	1	14.650.000
3.	Biota Perairan	0	0,00
4.	Tanaman	0	0,00
	Jumlah	0	16.650.000

Sedangkan nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Per 31 Des 2023	16.610.000
2. Penyusutan Tahun 2023	(0,00)
3. Akumulasi Penyusutan s/d tahun lalu	(0,00)
4. Akumulasi Penyusutan s/d tahun ini	(0,00)
5. Nilai Buku Per 31 Desember 2023	16.610.000

Aset Tetap Lainnya yang disusutkan adalah hanya Buku dan Perpustakaan, Aset Barang Bercorak Seni dan Aset Hewan Ternak dan Tanaman tidak disusutkan.



Konstruksi
Dalam
Pengerjaan

2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp.96.681.000

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp96.681.000, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp96.681.000, sehingga terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0,00..

Aset Lainnya

2.3. Aset Lainnya sebesar Rp. 0,00

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp.0,00.

Saldo aset lainnya yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2022	Mutasi Tahun 2023		Saldo 31/12/2023
		Tambah	Kurang	
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Tuntutan
Perbendaharaan
/Tuntutan Ganti
Rugi

2.3.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp. 0,00

Saldo Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan (TP/TGR) per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan.

Saldo tagihan TP/TGR yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2022	Mutasi Tahun 2023		Saldo 31/12/2023
		Tambah	Kurang	
	jumlah			



Mutasi penambahan tahun 2023 merupakan TP/TGR berdasarkan Surat Keputusan TP/TGR yang diterbitkan di tahun 2023 yang angsurannya akan jatuh tempo mulai tahun 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.		
2.		
	Jumlah	NIHIL

Sedangkan mutasi kurang tahun 2023 merupakan saldo TP/TGR tahun 2023 dan tahun – tahun sebelumnya yang angsurannya jatuh tempo di tahun 2023 dan penerimaan di tahun 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.		
2.		
	Jumlah	NIHIL

*Aset Lain-lain
(Rusak)*

2.3.2. Aset Lain-lain (Rusak) sebesar Rp.0,00

Saldo Aset Lain-lain (Rusak) per 31 Desember 2023 sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan.

Nilai Aset Lain-lain (Rusak) sebesar Rp0,00

tersebut merupakan nilai historis/perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Saldo Aset Lain-lain (Rusak) yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2022	Mutasi Tahun 2023		Saldo 31/12/2023
		Tambah	Kurang	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, BA dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00



Mutasi penambahan tahun 2023 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Hibah Masuk	0	0,00
• Reclas Masuk	0	0,00
• Koreksi tambah	0	0,00
Jumlah	0	0,00

Mutasi pengurangan tahun 2023 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Mutasi keluar ke SKPD	0	0,00
• Hibah keluar ke non SKPD	0	0,00
• Reclass keluar	0	0,00
• Koreksi kurang	0	0,00
• Penghapusan	0	0,00
Jumlah	0	0,00

Aset Lain-lain (Rusak) per 31 desember 2023 sebanyak 0 unit dengan nilai Rp0,00 tersebut meliputi:

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Tanah	0	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	0	0,00
3.	Bangunan Gedung	0	0,00
4.	Jalan, BA dan Jaringan	0	0,00
5.	Aset tetap Lainnya	0	0,00
	Jumlah	0	0,00

Sedangkan nilai Aset Lain-lain (Rusak) Per 31 Desember 2023 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Per 31 Des 2023		0,00
2. Penyusutan Tahun 2023	(0,00)	
3. Akumulasi Penyusutan s/d tahun lalu	(0,00)	
4. Akumulasi Penyusutan s/d tahun ini		(0,00)
5. Nilai Buku Per 31 Desember 2023		0,00



Aset Tak
Berwujud

2.3.3 Aset Tak Berwujud sebesar Rp. 0,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan, sebesar Rp0,00. Saldo Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2022	Mutasi Tahun 2023		Saldo 31/12/2023
		Tambah	Kurang	
Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Mutasi penambahan tahun 2023 merupakan aset tak berwujud yang diperoleh di tahun 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1		
2		
	Jumlah	

Sedangkan mutasi kurang tahun 2023 merupakan aset tetap tak berwujud yang dihapuskan habis masa manfaatnya di tahun 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Reclas Keluar	0,00
2.		0,00
	Jumlah	0,00

Sedangkan nilai Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023 setelah dikurangi akumulasi amortisasi sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Per 31 Des 2023		0,00
2. Amortisasi Tahun 2023	(0,00)	
3. Akumulasi Amortisasi s/d tahun lalu	(0,00)	
4. Akumulasi Amortisasi s/d tahun ini		0,00
5. Nilai Buku Per 31 Desember 2023		0,00



Kewajiban
kontruksi

2.4. KEWAJIBAN

2.4.1. Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 116.492.561,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp256.206.526,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 116.492.561,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp.139.713.965,00. Kenaikan/Penurunan Kewajiban Jangka Pendek tersebut disebabkan semakin tertibnya administrasi keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp 256.206.526,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 01/01/2022	Mutasi Tahun 2023		Saldo 31/12/2023
		Tambah	Kurang	
Utang Beban	116.492.561	139.713.965	0,00	256.206.526
Utang PFK	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan diterima di Muka	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	116.492.561	139.713.965	0,00	256.206.526

Utang Beban
Rp

2.4.1.1 Utang Beban sebesar Rp. 256.206.526,00

Saldo utang beban per 31 Desember 2023 sebesar Rp 256.206.526,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 116.492.561,00 sehingga terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp 139.713.965,00

Saldo tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Utang Beban Gaji	130.471.964
2.	Utang Beban Tamsil ASN	121.312.150
3.	Utang Beban Listrik	2.896.961
4.	Utang Beban Telepon	105.971
5.	Utang Beban Air	41.000
6.	Utang Beban Internet	1.378.480
7.	Utang Beban Tamsil PTT	0,00
	Jumlah	256.206.526



2.4.1.2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp. 0,00

Saldo utang PFK per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan.

Saldo tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.		0,00
2.		0,00
	Jumlah	0,00

*Pendapatan
diterima di Muka*

2.4.1.3. Pendapatan diterima di Muka Rp. 0,00

Saldo Pendapatan diterima di Muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp0,0

Rincian pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pajak Reklame Papan/Billboard / Videotron/Megatron - LO	0,00
2.	Pajak Reklame Kain – LO	0,00
3.	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO	0,00
4.	Pajak Reklame Selebaran - LO	0,00
5.	Pajak Reklame Berjalan – LO	0,00
	Jumlah	0,00

Ekuitas

2.5. EKUITAS

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Per 31 Desember 2023 sebesar Rp.14.083.666.168,00

*Catatan Penting
Lainnya*

2.6. CATATAN PENTING LAINNYA

Di samping informasi utama tersebut di atas, beberapa hal penting yang perlu diinformasikan dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah



Kabupaten Banjarnegara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

a. Dampak penyajian nilai aset dalam neraca akibat diberlakukannya batas minimal kapitalisasi aset.

Nilai aset yang disajikan dalam neraca adalah aset yang mempunyai nilai yang cukup material sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, mengenai batas minimal kapitalisasi aset. Dalam kebijakan akuntansi tersebut batas minimal aset yang disajikan dalam neraca adalah:

- Untuk kelompok peralatan dan mesin minimal nilai per unitnya Rp 500.000,00
- Untuk Gedung dan Bangunan minimal nilai per unitnya Rp 10.000.000,00.

Sementara itu untuk aset yang nilainya dianggap tidak material disajikan secara terpisah (*extracomptable*) dari aset yang disajikan dalam neraca. Sampai dengan tahun pelaporan 2023 berjumlah sebesar Rp.582.933.380,00

b. Kegiatan yang dibiayai dari dana bukan APBD Kabupaten Banjarnegara

Dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mendapat dukungan dana dari APBN, LOAN dan APBD Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi penggunaan dana yang berasal dari APBN untuk pelaksanaan kegiatan Tugas Perbantuan (TP) dan Dekonsentrasi (Dekon) yang dikelola oleh SKPD dengan rincian berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Dana Dekonsentrasi (DK)	0	0	0
2.	Dana Tugas Pembantuan (TP)			
	Jumlah			



Realisasi penggunaan dana LOAN/*Block Grant* yang berasal dari luar negeri yang dikelola oleh SKPD dengan rincian berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Dana Dekonsentrasi (DK)	0	0	0
2.	Dana Tugas Pembantuan (TP)	0	0	0
	Jumlah	NIHIL	0	0

Dana yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang dikelola SKPD dengan realisasi dana sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Dana Dekonsentrasi (DK)	0	0	0
2.	Dana Tugas Pembantuan (TP)	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

c. Aset tetap pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan selain Milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Di samping mengelola aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara juga mengelola aset tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 0,00 dan Pemerintah Pusat sebesar Rp 0,00 untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan rincian:

(dalam satuan Rupiah)

No	Jenis Aset tetap	BMD Provinsi	BMN
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Jalan, Bangunan Air dan Jaringan	0	0
5	Aset tetap Lainnya	0	0
	JUMLAH	0	0



LAMPIRAN-LAMPIRAN